

Analisis Belanja Pajak (*Tax Expenditure*) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan *Tax Ratio* di Indonesia

Rinaldi

Universitas Muhammadiyah Sukabumi

ABSTRACT

This study aims to find out how it affects the government tax expenditure given to gross domestic income (GDP) and also the effect on Indonesia's tax ratio. Gross domestic income is a reflection of a country's economic growth, meaning that the higher the level of a country's gross domestic income, the higher the level of economic growth of a country, and vice versa the lower the level of gross domestic income of a country, it can be said that the rate of economic growth of a country it is also low. One indicator to determine the success rate of a country in collecting taxation is to use a ratio called the tax ratio. Tax ratio is obtained from total tax revenue divided by total gross domestic income, so that the high and low gross domestic income will also affect the tax ratio of a country. So in this case the government's effort to increase gross domestic product is by giving tax expenditure in the form of relief, eliminating taxes to productive sectors so that production is expected to increase. So that this tax expenditure is expected to trigger the increase in Gross Domestic Product (GDP) and increase in Tax Ratio.

Keywords: *Tax Expenditure, Gross Domestic Product (GDP), Tax Ratio*

1. Pendahuluan

Melihat dari sumber – sumber pendapatan negara yang ada sekarang ini, memang pendapatan berupa pajak yang sangat dominan sekali dibandingkan dengan pendapatan negara bukan pajak. Sehingga negara dalam hal ini, saat ini berupaya memaksimalkan potensi perpajakan dari semua sektor–sektor ekonomi yang ada sekarang. Sektor - sektor ekonomi dengan basis sumber daya alam, sumber daya alam yang dahulunya potensinya begitu besar, akan tetapi kalau dilihat dari sumber daya alam (SDA) yang ada di Indonesia sekarang ini, sudah makin lama makin berkurang. Pemerintah dalam hal ini, berupaya dengan melakukan inovasi sumber daya alam, yakni dengan nama sumber daya alam diperbaharui. Sebagai contoh sumber daya alam diperbaharui, salah satu contohnya adalah tumbuh-tumbuhan seperti membuka lahan kebun sawit, lahan kebun karet sebagai pengganti hutan sudah dieksploitasi.

Memperbaharui sumber daya alam seperti tumbuhan keras , membutuhkan pembiayaan yang besar, sehingga diperlukan investasi yang besar juga untuk mengolah sumber daya alam yang diperbarui tersebut. Investasi yang dibutuhkan ini oleh pemerintah diberi keringanan kepada investor-investor yang melakukan investasi tersebut, dengan memberikan kemudahan dalam izin-izin untuk investasi dan kemudian juga pemerintah memberikan kebijakan stimulus ekonomi berupa kebijakan insentif fiskal pajak. Kebijakan ini tujuannya adalah untuk menarik investasi langsung, dimana ada beberapa insentif yang diberikan kepada para investor, seperti pengurangan dan penghapusan PPN, penghapusan PPhBM, dan penghapusan PPh Pasal 22 dsbnya.

Bertambahnya insentif pajak yang diberikan kepada para investor, maka secara langsung akan meningkatkan tax expenditure (belanja pajak). Meningkatnya belanja pajak maka untuk jangka pendek akan mengurangi

pendapatan negara dari sektor pajak, sehingga *tax ratio* juga akan turun. Akan tetapi apabila tujuan kebijakan ini tepat sasaran maka tentu akan mendorong dan tumbuhnya perekonomian Indonesia. Belanja pajak adalah merupakan penerimaan pajak yang tidak terhimpun atau berkurang akibat adanya ketentuan khusus yang berbeda dari system perpajakan secara umum.

Dalam Laporan Laporan Belanja Perpajakan (*Tax Expenditure Report*) yang diterbitkan bulan agustus 2018, menyajikan belanja perpajakan untuk tahun 2016 sebesar Rp. 143,6 trilyun dan tahun 2017 sebesar Rp. 154,7 trilyun. Tujuan pemerintah untuk melakukan penghitungan belanja pajak (*tax expenditure*) ini adalah agar transparansi dan akuntabilitasnya terjaga. Adanya penghitungan belanja pajak bagi pemerintah merupakan sarana untuk mengawasi dan mengevaluasi dalam mengelola keuangan negara, dimana kebijakan ekonomi yang digulirkan berupa pemberian insentif pajak apakah sudah efektif dan memberikan manfaat kepada negara.

Tabel 1
Pertumbuhan penerimaan pajak di
Indonesia. Tahun 2010 - 2017

Tahun	Total APBN (Trilyun Rupiah)	Realisasi Penerimaan Pajak (Trilyun Rupiah)	Penerimaan Pajak Thd APBN (%)
2010	995,3	723,30	72,67%
2011	1.210,6	873,87	72,18%
2012	1.338,1	980,52	73,27%
2013	1.438,9	1.029,85	71,57%
2014	1.550,6	1.103,22	71,14%
2015	1.761,6	1.205,47	68,43%
2016	1.822,5	1.249,49	68,55%
2017	1.750,3	1.436,73	82,08%

Sumber : Nota Keuangan & APBN

Kalau dilihat dari data diatas setiap tahun realisasi penerimaan pajak dari tahun 2010 – 2017 cenderung meningkat, dan sejalan juga dengan peningkatan target penerimaan pajak pada APBN dari tahun ke tahun. Jadi secara kasat mata realisasi penerimaan pajak selalu meningkat dari tahun ke tahun, artinya peningkatan realisasi penerimaan pajak tersebut , menandakan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan sektor produksi, sektor konsumsi mengakibatkan adanya potensi pajak yang dapat di kenakan pajak, sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan perpajakan.

Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari tingkat Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product* (GDP). Pertumbuhan ekonomi ini mengandung pengertian bahwa ada proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang atau adanya perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang terjadi dari tahun ke tahun. GDP ini mengukur output produksi nasional yang ada di dalam negeri , dimana produksi tersebut dihasilkan oleh bangsa sendiri maupun oleh orang asing.

Semakin meningkat pertumbuhan ekonomi suatu negara , maka akan semakin meningkat penerimaan perpajakan yang akan diperoleh dari berbagai sektor ekonomi tersebut. Sehingga *tax ratio* nya semakin meningkat. *Tax ratio* pada dasarnya adalah mengukur penerimaan pajak dengan PDB (*Produk domestik Bruto*) / GDP suatu negara.

Maka dengan melihat definisi tersebut *tax ratio* ini digunakan untuk melihat berapa besar porsi perpajakan dalam perekonomian suatu negara. Sehingga *tax ratio* ini dapat dikatakan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan penerimaan pajak. Semakin tinggi penerimaan pajak suatu negara, maka semakin tinggi pula *tax rasionya*. Penerimaan pajak yang tinggi maka, suatu negara akan lebih leluasa dalam mengatur keuangan negara tersebut.

Tax ratio secara rumus sebagai berikut :

$$\text{Tax Ratio} = \frac{(\text{Total Penerimaan Pajak})}{\text{PDB}}$$

Semakin tinggi *tax ratio* maka semakin tinggi pula penghasilan masyarakat masuk dalam penerimaan pajak, dengan kata lain masyarakat ini adalah seluruh lapisan masyarakat, apakah itu masyarakat produsen, maupun masyarakat konsumen.

Tabel 2

Pertumbuhan perekonomian Indonesia dan pertumbuhan *tax ratio* Tahun 2010 – 2017

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak (Trilyun Rupiah)	PDB (GDP)	Tax Ratio (%)	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (%)
2010	723,30	6.446,85	11,2 %	6,2%
2011	873,87	7.419,18	11,7 %	6,4%
2012	980,52	8.230,92	11,9 %	6,0%
2013	1.029,85	9.087,27	11,9 %	5,6%
2014	1.103,22	10.094,92	11,4 %	5,0%
2015	1.205,47	11.526,33	10,7 %	4,8%
2016	1.249,49	12.406,77	10,1 %	5,2%
2017	1.436,73	13.588,79	10,9 %	5,1%

Sumber : data BPS (data PDB atas harga berlaku)

Program pemerintah yang dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara, terutama bersumber dari perpajakan. Ada permasalahan ketika terjadi ekonomi lesu dan daya beli masyarakat lemah, maka pemerintah berupaya untuk menjaga perekonomian dalam negeri supaya tidak ikut melemah, dengan cara memberikan insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis seperti yang tema kebijakan fiskal

pada APBN 2017. Adanya insentif fiskal ini, sehingga mengakibatkan meningkatnya belanja pajak (tax expenditure). Apakah adanya kebijakan insentif fiskal ini akan bisa mengakibatkan meningkatnya jumlah penerimaan pajak bagi negara. Berkaitan dengan kebijakan insentif fiskal yang telah dilakukan oleh negara tahun 2016 dan 2017, maka penulis mencoba menganalisis dampak belanja pajak (tax expenditure) terhadap pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan tax ratio di Indonesia baik jangka pendek maupun jangka panjang.

2. Landasan Teori

Kebijakan perpajakan di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan ekonomi yang terjadi. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan maka kebijakan perpajakan perlu diselaraskan. Misalnya pemerintah sangat mendukung upaya peningkatan export dan pengembangan investasi, maka pada akhirnya diharapkan dapat mencapai pertumbuhan perekonomian yang tinggi.

Tax Expenditure (Biaya Perpajakan)

Menurut Makmun Abdullah, konsep Tax expenditure muncul pada tahun 1960-an yang mulai dipraktekkan di Amerika Serikat dan Jerman. Kedua negara ini pertama kali yang melaporkan anggaran pengeluaran pajak (tax expenditure budgets), untuk meningkatkan secara langsung transparansi dalam kegiatan publik. Selanjutnya pada era tahun 80-an, praktek ini diperpanjang ke hampir semua negara anggota Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), dan beberapa negara berkembang lainnya.

Menurut OECD (2007), mendefinisikan “*Tax Expenditure as transfer of public resources carried out through a reduction in contributive obligations in relation to a given tax reference point (a*

socalled benchmark), rather than the route of direct expenditure”.

Menurut Anderson (2008), menyatakan bahwa Tax expenditure mewakili ketentuan hukum pajak, peraturan atau praktek-praktek yang mengurangi atau menunda pendapatan untuk populasi yang relative sempit pembayar pajak relative terhadap pajak patokan.

Pemerintah Australia dalam The Tax Expenditure Statement (TES) mendefinisikan Tax Expenditures sebagai sebuah hasil dari ketentuan Undang-Undang Pajak yang menyebabkan penyimpangan (deviation) dari perlakuan pajak standar yang berlaku untuk suatu kegiatan (benchmark treatment).

Darussalam dan B. Bawono Kristiaji (2014) mendefinisikan Tax Expenditure merupakan suatu ketentuan khusus dari sistem perpajakan yang berlaku secara umum di suatu negara. Ketentuan khusus tersebut berdampak pada berkurangnya penerimaan pajak yang seharusnya bisa diperoleh oleh suatu negara.

Pertumbuhan Ekonomi.

Suatu negara dikatakan mengalami adanya pertumbuhan ekonomi, manakala adanya proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang atau perubahan tingkat kegiatan ekonomi dari tahun ke tahun. Tolok ukur dari pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah GNP (Gross National Product) atau GDP (Gross Domestic Product) atau PDB (Product Domestic Bruto). GNP ini mengukur output produksi perekonomian nasional yang dimiliki warga negara sendiri, baik yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri. Sedangkan GDP / PDB mengukur ouput produksi di dalam negeri, dengan tidak memandang apakah produksi itu dihasilkan oleh warga asing atau warga sendiri.

Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses perubahan

perekonomian negara dalam jangka waktu tertentu untuk menuju kondisi ekonomi suatu negara yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi ini identik dengan kenaikan kapasitas produksi yang diwujudkan dengan kenaikan pendapatan nasional. Suatu negara yang mengalami kenaikan pertumbuhan ekonomi diindikasikan dengan kehidupan masyarakatnya yang lebih baik.

Menurut Simon Kuznet (1975), mendefinisikan pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah “ *kemampuan suatu negara untuk menyediakan barang-barang ekonomi yang terus meningkat bagi penduduknya, pertumbuhan kemampuan ini berdasarkan kepada kemajuan teknologi dan kelembagaan serta penyesuaian ideology yang dibutuhkannya*”.

Menurut Sadono Sukirno (1985), pengertian pertumbuhan ekonomi adalah perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahun. Untuk mengetahui pertumbuhannya, maka harus dilakukan perbandingan pendapatan nasional negara dari tahun ke tahun, yang kenal dengan laju pertumbuhan ekonomi.

Menurut Budiono (1994), pengertian pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses pertumbuhan output per kapita jangka panjang yang terjadi apabila ada peningkatan output yang bersumber dari proses intern perekonomian itu sendiri dan sifatnya sementara.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah:

- a. Akumulasi modal (investasi)
- b. Pertumbuhan penduduk. Artinya semakin banyak angkatan kerja berarti semakin produktif tenaga kerja, sedangkan semakin banyak penduduk akan meningkatkan potensi pasar domestik.
- c. Kemajuan teknologi
- d. Peningkatan eksport
- e. Pajak

Kemudian cara menghitung pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah sbb:

$$\text{Pertumbuhan ekonomi tahun } t \equiv \frac{\text{GDP } t - \text{GDP } t-1}{\text{GDP } t-1} \times 100\%$$

Tahun t = tahun yang dihitung pertumbuhannya

GDP t = Pertumbuhan tahun t

GDP $t - 1$ = Pertumbuhan tahun sebelum perubahan

Dengan demikian jelas bahwa pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses dan bukan suatu gambaran ekonomi sesaat yakni dengan melihat perkonomian berubah sewaktu-waktu, yang berkaitan dengan output berupa peningkatan produksi barang dan jasa.

Tax Ratio

Tax ratio merupakan suatu ukuran kinerja penerimaan pajak dalam suatu negara. Namun dari berbagai literatur, *tax ratio* bukanlah satu satunya indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja pajak. Walaupun demikian, hingga saat ini *tax ratio* menjadi ukuran yang dianggap memberi gambaran umum atas kondisi perpajakan disuatu negara.

Adapun definisi sederhana *tax ratio* adalah perbandingan antara total penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB) dimasa yang sama. Produk Domestik Bruto adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian suatu negara, dikurangi nilai barang dan jasa yang digunakan dalam produksi.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi *tax ratio*, antara lain ;

- a. Faktor yang bersifat makro, diantaranya tarif pajak, tingkat pendapatan perkapita dan tingkat optimalisasi tata laksana pemerintahan yang baik.

- b. Faktor yang bersifat mikro, diantaranya tingkat kepatuhan wajib pajak, komitmen dan koordinasi antar lembaga negara serta kesamaan persepsi antara wajib pajak dan peugas pajak.

Angka *tax ratio* digunakan untuk mengukur optimalisasi kapasitas administrasi perpajakan dalam rangka menghimpun penerimaan pajak disuatu negara. Terkait dengan penerimaan pajak dalam rangka menghitung *tax ratio*, Indonesia sendiri memiliki dua model dalam perhitungan *tax ratio*, yaitu *tax ratio* dalam arti luas dan *tax ratio* dalam arti sempit. *Tax ratio* dalam arti luas membandingkan total nilai penerimaan perpajakan (pajak pusat), penerimaan SDA migas dan pertambangan minerba dengan PDB nominal. Sedangkan *tax ratio* dalam arti sempit membandingkan total nilai penerimaan perpajakan (pajak pusat) dengan PDB nominal.

3. Hasil dan Pembahasan

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dilihat dari data BPS memperlihatkan kecenderungan semakin menurun. Ada beberapa pilar dari factor-faktor penyebab pertumbuhan ekonomi ini meningkat mengalami pelambatan pertumbuhan dan cenderung menurun. Misalnya akumulasi modal (investasi) yang masuk ke Indonesia, sangat mempengaruhi daripada pertumbuhan ekonomi tersebut.

Hal ini dikarenakan investasi yang banyak dilakukan dengan berbagai bentuk investasi produksi, maka akan menyerap tenaga kerja produktif, sehingga mengurangi pengangguran. Tenaga kerja produktif yang menghasilkan ini dengan sendirinya akan melakukan konsumsi, sehingga tingkat konsumsi yang tinggi oleh tenaga kerja akan meningkatkan pajak bagi negara. Akan tetapi kalau negara Indonesia kondisinya politiknya kondusif, tentram dan aman, maka investasi berupa akumulasi modal ini akan semakin

meningkat sehingga produksi semakin meningkat dan pengangguran semakin rendah.

Kemudian pertumbuhan penduduk Indonesia semakin meningkat, sebetulnya secara teori pertambahan penduduk tersebut merupakan faktor penyebab pertumbuhan ekonomi, tentunya diasumsikan penduduk yang bertambah tersebut adalah penduduk yang produktif dan menghasilkan, dan tidak dalam kondisi pengangguran. Karena pengangguran ini adalah beban negara, oleh sebab itu semakin tinggi tingkat pengangguran maka semakin tinggi pula beban negara untuk mensubsidi pengangguran tersebut. Maka tingkat pengangguran ini harus ditekan sedemikian rupa supaya menjadi rendah, dengan menciptakan dan menyediakan lapangan kerja.

Memperbaiki iklim investasi adalah suatu cara yang harus ditempuh oleh pemerintah. Kemudahan-kemudahan untuk berinvestasi bagi investor-investor, seperti untuk mempermudah urusan perizinan, mempermudah birokrasi dengan pemerintah daerah dan lain sebagainya.

Dalam 5 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu dibawah 6%, bahkan pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 4,8%. Upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi terus dilakukan, adalah salah satunya adalah pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu kebijakan pengeluaran pajak (tax expenditure) dengan memberikan insentif pajak, keringanan pajak dan penghapusan pajak-pajak tertentu yang dikelola pemerintah pusat, yaitu PPN, PPnBM, PPh dan Bea Masuk dan Cukai, terhadap investasi strategis.

Laporan Belanja Perpajakan tahun 2016 dan 2017 memberikan informasi adalah sebesar 143,6 triliun atau 1,16% dari PDB dan 154,7 triliun atau sebesar 1,14% dari PDB.

Sedangkan Estimasi Belanja Perpajakan tahun 2016 dan 2107 berdasarkan jenis pajak sbb:

Tabel 3
Estimasi Belanja Pajak Tahun 2016-2017

Jenis-jenis Pajak	Tahun 2016 (Miliar)	Tahun 2017 (Miliar)
PPN dan PPn BM	114.227	125.329
PPh	20.525	20.179
Bea Masuk dan Cukai	8.839	9.153
Total	143.591	154.660

Sumber data : Laporan Belanja Pajak RI

Kalau dilihat dari data belanja pajak diatas, bahwa pemerintah memberikan penghapusan dan keringanan PPN yang semakin meningkat. Maksud pemerintah dengan meningkatkan belanja pajak untuk PPN ini adalah untuk meningkatkan produksi dari sektor-sektor produksi yang diberi oleh pemerintah berupa belanja pajak tadi, dengan maksud supaya adanya pertumbuhan produksi, sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekspor.

Begitu juga dengan Peningkatan belanja pajak atas Bea Masuk dan Cukai, dimaksudkan pemerintah memberikan keringanan dan penghapusan untuk Bea Masuk dan Cukai, supaya produk impor yang dibutuhkan oleh sektor produksi di dalam negeri, tidak terlalu tinggi costnya, sehingga dapat menurunkan harga pokok per produksi dalam negeri, sehingga harga untuk diekspor kembali setelah di produksi akan dapat bersaing dengan eksportir negara lain.

Meningkatnya ekspor maka neraca perdagangan akan meningkat (surplus), sehingga neraca menjadi positif, artinya nilai ekspor lebih tinggi dari nilai import. Ekspor yang positif maka akan menguatkan mata uang negara tersebut, dan diartikan neraca perdagangan surplus bahwa kekayaan negara meningkat. Seperti diketahui bahwa salah

satu faktor meningkatnya pertumbuhan ekonomi adalah adanya meningkatnya jumlah ekspor. Diharapkan biaya pajak (tax expenditure) ini secara tidak langsung sebagai pemicu untuk pertumbuhan ekonomi. Kalau dilihat trend nilai ekspor dan import pada periode tahun 2013 – 2017 cenderung menurun.

Tabel 4
Neraca Perdagangan Indonesia Tahun 2013
– 2017 (Nilai : Juta US \$)

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
I	E K S P O R	182. 551, 80	175. 980, 00	150. 366, 30	145. 186, 20	168. 828, 20
	- M I G A S	32.6 33,0 0	30.0 18,8 0	18.5 74,4 0	13.1 05,5 0	15.7 44,3 0
	- N O N M I G A S	149. 918, 80	145. 961, 20	131. 791, 90	132. 080, 80	153. 083, 90
II	I M P O R	186. 628, 70	178. 178, 80	142. 694, 80	135. 652, 90	156. 985, 60
	- M I G A S	45.2 66,4 0	43.4 59,9 0	24.6 13,2 0	18.7 39,3 0	24.3 16,0 0
	- N O N M I G A S	141. 362, 30	134. 718, 90	118. 081, 60	116. 913, 60	132. 669, 50
III	Total	369. 180, 50	354. 158, 80	293. 061, 10	280. 839, 10	325. 813, 70
	- M I G A S	77.8 99,4 0	73.4 78,7 0	43.1 87,5 0	31.8 44,8 0	40.0 60,3 0
	- N O N M I G A S	291. 281, 10	280. 680, 10	249. 873, 50	248. 994, 30	285. 753, 40
IV	NERAC A	- 4.07 6,90	- 2.19 8,80	- 7.67 1,50	- 9.53 3,30	11.8 42,6 0
	- M I G A S	- 12.6 33,3 0	- 13.4 41,1 0	- 6.03 8,80	- 5.63 3,90	- 8.57 1,70
	- N O N M I G A S	- 8.55 6,40	- 11.2 42,3 0	- 13.7 10,3 0	- 15.1 67,2 0	- 20.4 14,3 0

Sumber: BPS, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi, Kementerian Perdagangan

Kalau dilihat dari data diatas , bahwa ekspor Indonesia dari tahun 2013 – 2017 memiliki tren kecenderungan menurun, terutama sekali adalah sektor migas. Jadi bisa disimpulkan bahwa negara Indonesia tidak bisa lagi mengandalkan ekspor dari sektor migas. Artinya sumber daya alam berupa migas, lambat laun akan berkurang dan menipis. Sehingga negara harus berorientasi untuk ekspor dari sektor non migas.

Kemudian dampak dari belanja pajak terhadap tax ratio ini adalah belanja pajak dapat dikatakan juga secara tidak langsung sebagai pemicu dari peningkatan tax ratio. Hal ini disebabkan bahwa pemberian insentif pajak kepada sektor produktif maka diharapkan akan menambah daya Tarik bagi investor agar mau berinvestasi di sektor-sektor produktif.

Semakin banyak investasi yang masuk ke negara Indonesia , maka akan menyebabkan banyak terserapnya pekerja produktif, sehingga mengurangi pengangguran. Semakin meningkatnya investasi maka akan semakin meningkatnya produksi dari sektor produktif tersebut. Sehingga peningkatan produksi akan meningkatkan ekspor dan konsumsi di dalam negeri. Semakin ekspor meningkat maka GDP Indonesia akan meningkat. Semakin meningkatnya GDP Indonesia maka akan meningkatkan Tax Ratio Indonesia. Maka dapat dikatakan dengan mengeluarkan belanja pajak tersebut, diharapkan dapat sebagai pemicu dari peningkatan tax ratio Indonesia.

Tax ratio bisa dikatakan sebagai salah satu indicator untuk mengukur keberhasilan penerimaan pajak, sehingga dapat dianggap memberikan gambaran umum atas kondisi perpajakan suatu negara.

Menurut OECD (2016), Sebagai perbandingan Tax Ratio dengan negara-negara tetangga yakni negara di Asia, maka Tax Ratio Indonesia termasuk rendah. Dapat dilihat sebagai perbandingan Tax Ratio negara-negara di Asia untuk tahun 2014 sbb : Singapore sebesar 13,9%. Malaysia sebesar 15,9%. Philipina sebesar 16,7%. Korea Selatan sebesar 24,6%. Jepang sebesar 32,2%.

Masih rendahnya tax ratio Indonesia, menunjukkan bahwa terserapnya penerimaan pajak di Indonesia masih rendah. Banyak factor – faktor yang harus dibenahi oleh pemerintah untuk meningkatkan tax ratio tersebut. Seperti reformasi aturan-aturan yang lebih fair dan adil bagi wajib pajak, administrasi pajak yang mudah dan tidak berbelit-belit, membuat layanan prima dan ramah terhadap Wajib Pajak, tidak membiarkan korupsi meraja lela di semua aspek, karena anggaran yang digunakan dalam belanja negara hampir 80% bersumber dari penerimaan pajak yang disumbangkan oleh masyarakat, pemerataan pembangunan di semua daerah sehingga masyarakat bisa menikmati hasil pembangunan itu bersumber dari pungutan pajak dan kembali dinikmati oleh masyarakat. Kalau sekiranya hal tersebut diatas dapat dilakukan oleh pemerintah maka dengan demikian akan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pajak.

4. Simpulan

Memaksimalkan penerimaan pajak di Indonesia memang menjadi tujuan utama bagi pemerintah Indonesia sebagai sumber pendapatan negara. Hal ini dapat dilihat dalam APBN, dimana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tersebut komponen pendapatan negara yang terbesar adalah pendapatan dari pajak. Untuk mengukur tingkat keberhasilan keterserapan pajak oleh negara, salah satu indicator yang digunakan adalah menggunakan Tax Ratio.

Tax Ratio ini diperoleh dari total penerimaan pajak dibagi pendapatan domestic bruto. Tax ratio Indonesia termasuk rendah dibandingkan dengan negara-negara Asean maupun Asia. Hal ini menandakan bahwa Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia juga rendah. Bagaimana upaya untuk meningkatkan PDB ini, maka dilakukan cara dengan memberikan tax expenditure (belanja pajak) berupa keringanan, penghapusan dan kemudahan – kemudahan dalam administrasi perpajakan untuk sektor-sektor produktif. Dengan adanya tax expenditure ini diharapkan sebagai pemicu dalam meningkatkan produksi, sehingga meningkatnya produksi, maka tentu akan meningkatkan ekspor dan meningkatkan konsumsi dalam negeri. Peningkatan ekspor dengan sendirinya akan mengakibatkan neraca perdagangan menjadi surplus, karena ekspor lebih besar dari impor, sebab kebutuhan untuk impor akan berkurang, karena sudah terpenuhi oleh produksi dalam negeri. Kalau hal ini berjalan dengan baik, maka diharapkan bisa meningkatkan PDB, dan dengan meningkatnya PDB maka Tax ratio juga akan meningkat.

Daftar Pustaka

- Asrul Hidayat, Tubagus Chairul Amachi. Analisis Penerimaan Pajak dengan Pendekatan Produk Domestik Bruto Sektorial. Jurnal FEB UI, 2103.
- Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id>. Diunduh tanggal 12 oktober 2018
- Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Nota Keuangan dan RAPBN tahun 2017. Jakarta.
- Mankiew, N, Gregory (2006). Principles of Economics Third Edition - Pengantar Ekonomi Makro, Jakarta, Salemba Empat.
- Kementerian Keuangan (Badan Kebijakan Fiskal), Laporan Belanja Perpajakan tahun 2016 dan 2017 (Tax

- Expenditure Report in 2016 – 2107).
Jakarta.
- OECD (2016), Revenue Statistic in Asian Countries 2016 : Trends in Indonesia, Japan, Kores, Malaysia, the philipiness, and Singapore, OECD publishing, Paris.
- Sadono Sukirno,2011, Pengantar Ekonomi Makro Teori edisi 3, Jakarta, Rajagrafino Persada.
- Surrey, Stanley S and Paul R. Mc Daniel (1985). Tax Expenditure (Massachusetts : Harvard University Press), dalam Darussalam dan Bawono Kristiaji, dalam Tax expenditure atas pajak penghasilan, working paper no 0814, Danny Darussalam Tax Center, Juni 2014.